

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makroekonomi

1. Definisi Makroekonomi

Teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi biasanya dibedakan kepada dua bentuk teori, yaitu: teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Kata mikro dan makro berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro berarti kecil, sedangkan makro berarti besar. Pengertian ini menggambarkan cara pendekatan yang digunakan dalam analisis mikroekonomi dan makroekonomi.

Teori makroekonomi memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh (makro) dari kegiatan ekonomi. Apabila yang dibicarakan adalah produsen, maka yang diperhatikan adalah kegiatan produsen-produsen dalam keseluruhan ekonomi. Begitu pula, apabila yang diperhatikan ialah tingkah laku konsumen, yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi juga diperhatikan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Dalam aspek ini yang diperhatikan adalah tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran.

2. Pola analisis makroekonomi

Yang dimaksud dengan pola analisis adalah cara pendekatan yang biasanya digunakan dalam memberikan gambaran secara makro tentang penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian, masalah-masalah yang dihadapi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu dijalankan.

Pada dasarnya analisis makroekonomi dapat dibedakan menjadi 4 aspek utama, yaitu penentuan keseimbangan pendapatan nasional, masalah-masalah ekonomi yang selalu dihadapi oleh perekonomian, peranan pemerintah dalam menstabilkan kegiatan perekonomian dan menghindari berbagai masalah makroekonomi yang timbul, dan beberapa aspek mikro (atau fundasi mikroekonomi) dari analisis makroekonomi.

Dalam menerangkan dan menganalisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi perlu dibedakan tiga pendekatan. Yang pertama dikenal sebagai pendekatan Keynesian sederhana. Dalam pendekatan ini ditunjukkan bagaimana perbelanjaan agregat dalam perekonomian akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat pendapatan nasional. Pendekatan Keynesian sederhana ini selanjutnya dapat pula dibedakan kepada tiga model atau abstraksi dari suatu perekonomian, yaitu keseimbangan untuk perekonomian yang hanya terdiri dari dua sektor (perusahaan dan rumah tangga), keseimbangan untuk perekonomian tiga sektor (dengan memasukkan unsur pembelanjaan dan perpajakan pemerintah, dan keseimbangan untuk perekonomian terbuka (dengan mempertimbangkan juga kegiatan ekspor dan impor). Tentunya

dari ketiga analisis ini yang paling realistis adalah keseimbangan dalam perekonomian terbuka yang merupakan gambaran paling mendekati keadaan yang sebenarnya mengenai perbelanjaan agregat yang akan berlaku dalam setiap perekonomian.

Dalam analisis pendekatan pertama ini dimisalkan tingkat harga dan suku bunga tidak mengalami perubahan, yaitu kedua variabel ini adalah konstan sepanjang analisis dibuat. Pada mulanya orang menganggap penggunaan pemisalan bahwa harga-harga tidak mengalami perubahan adalah cukup realistis, karena dalam perekonomian yang menghadapi masalah pengangguran, perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional akan dapat berlaku tanpa menimbulkan kenaikan harga-harga.

Analisis makroekonomi berkembang atas dasar keyakinan bahwa sistem pasar bebas tidak selalu mewujudkan keadaan kegiatan ekonomi yang ideal, yaitu tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Setiap perekonomian akan selalu menghadapi masalah pengangguran dan inflasi, dan beberapa masalah makroekonomi lainnya. pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu. Sesuai dengan kenyataan seperti ini, analisis makroekonomi mencoba menerangkan isu-isu tersebut. Oleh karena itu, menganalisis mengenai masalah-masalah makroekonomi yang utama yaitu inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dan menerangkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga

perekonomian dapat berkembang secara stabil dan teguh, merupakan bagian yang penting dari analisis makroekonomi.¹⁶

B. Hakikat Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Produk (GDP), Menurut Definisi umum para ahli mengatakan bahwa pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Produk* (GDP) adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah di saat tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan alat pengukur dari pertumbuhan ekonomi dimana alat pengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB, PDB perkapita dan Pendapatan per jam Kerja. Sebagai alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi PDB memiliki rumus dalam mencari PDB

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Secara kasar PDB dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi suatu negara, akan tetapi ukuran ini tidak terlalu tepat.

¹⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kansius, 2004), hlm 257-259.

Mengapa dikatakan tidak tepat karena jika hanya melihat PDB, perhitungan tersebut masih mengabaikan faktor jumlah penduduk.

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :

- a. Produk Nasional Bruto. yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
- b. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar. yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
- c. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu. produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.

- d. Angka-angka per kapita, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

C. Hakikat Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Adapun Roger G. Ibbotson dan Gary P. Brinson mengatakan *inflation is a sustained increase in the general price level over time*. Lebih jauh Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri mengatakan inflasi adalah suatu keadaan di mana nilai uang menurun secara terbuka, akibat harga-harga barang umumnya naik.¹⁷

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada harga lainnya. Ketika inflasi tinggi maka akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan menaikkan tingkat suku bunga. Tingginya tingkat suku bunga akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan

¹⁷ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 21

tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁸ Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).¹⁹

Pada dasarnya, terjadinya inflasi bukanlah masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan diimbangi dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut. Akan tetapi, manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi untuk menjadikan harga jualnya relatif tinggi sementara di sisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap, maka barulah inflasi ini

¹⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 147

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 135

menjadi sesuatu yang menakutkan. Bila kondisi tersebut terjadi maka daya beli masyarakat akan menurun, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk menginvestasikan dana mereka. Mereka lebih memilih membelanjakan dana mereka untuk mencukupi kebutuhannya. Kondisi inilah yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.

2. Jenis-jenis Inflasi

a. Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu:

- 1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10 – 30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya.
- 3) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30 – 100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
- 4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi

menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.²⁰

- b. Berdasarkan asalnya, inflasi digolongkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*). Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Inflasi semacam ini biasanya dialami negara-negara berkembang yang sebagian bahan bakunya dari luar negeri.
 - 2) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*). Inflasi ini disebabkan faktor-faktor di dalam negeri, antara lain: (a) Terjadi defisit anggaran secara terus-menerus, defisit anggaran ini bisa jadi ditutup dengan mencetak uang baru. Penciptaan uang baru yang berlebihan, sebagaimana kita tahu, dapat menyebabkan inflasi. (b) Terjadi gagal panen, gagal panen dapat mengurangi penawaran barang di pasar. Bila permintaan lebih tinggi dari penawaran, pada akhirnya harga akan meningkat. Inflasi akan terjadi. (c) Kredit untuk keperluan produksi dibatasi, kondisi semacam ini akan mengakibatkan harga barang dari waktu ke waktu semakin naik. Karena harga naik, para produsen cenderung akan menyimpan barangnya untuk mendapatkan harga yang setinggi-tingginya. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseimbangan

²⁰ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro...*, hal. 260

antara permintaan barang oleh konsumen dengan barang yang disediakan oleh produsen. Harga pun akan naik.

- c. Berdasarkan sebabnya, inflasi digolongkan menjadi:
- 1) Kenaikan permintaan (*Demand-pull Inflation*). Inflasi terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang lebih besar daripada penawaran barang, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Agar keseimbangan terjadi maka harga barang naik. Inflasi ini bisa muncul karena beberapa hal. Terlalu banyaknya uang yang dialirkan bank sentral bisa menyebabkan inflasi. Meningkatnya anggaran belanja negara dan ekspansi bisnis juga dapat meningkatkan permintaan barang secara keseluruhan. Inflasi juga dapat terjadi jika pajak diturunkan atau konsumen enggan menabung dan lebih suka membeli barang lebih banyak.
 - 2) Kenaikan biaya produksi (*Cost-push Inflation*). Kenaikan harga-harga faktor produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, mendorong produsen untuk menaikkan harga jual di setiap titik produksinya. Kenaikan harga jual ini akan mengakibatkan keseimbangan pasar berubah, di mana harga sekarang menjadi lebih mahal dibandingkan keseimbangan sebelumnya.
 - 3) Ekspektasi masyarakat (*Expectation*). Apa yang masyarakat prediksikan di masa yang akan datang ternyata sangat

berpengaruh terhadap keputusannya sekarang. Fakta bahwa ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi inflasi sangatlah tidak menguntungkan bagi perekonomian, terutama bila masyarakat atau perusahaan mendasarkan ekspektasinya pada kejadian masa lalu. Ketika terjadi kenaikan harga, masyarakat akan terus berekspektasi bahwa harga akan terus naik.²¹

3. Cara Mengatasi Inflasi

Dalam batas-batas tertentu inflasi memang menguntungkan, karena pada dasarnya inflasi yang terkendali akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika sudah dalam taraf yang membahayakan, inflasi harus segera diatasi. Adapun cara mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan (melalui bank sentral) untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Bentuk kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut.

1) Penetapan Cadangan Minimum (*Reserve Requirement Policy*).

Bank sentral mewajibkan bank umum untuk menaruh sejumlah dananya, menurut persentase tertentu dari seluruh dana yang dihimpunya di bank sentral. Bila bank sentral ingin memperkecil jumlah uang beredar di masyarakat, bank sentral

²¹ Wahyu Adji, et. all., *Ekonomi untuk SMA/MA Jilid 1 Kelas X*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 193-197

bisa menaikkan tingkat cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum. Dengan demikian, dana yang dapat disalurkan oleh bank umum semakin kecil, yang pada akhirnya jumlah uang beredar semakin sedikit.

- 2) Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*). Bank sentral juga dapat melakukan intervensi di pasar uang melalui operasi pasar terbuka. Intervensi ini antara lain dilakukan dengan menjual berbagai surat berharga seperti obligasi, SBI, dan SBPU. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.
 - 3) Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*). Sebagai *the lender of last resort*, bank sentral dapat meminjamkan dananya kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dengan mengenakan tingkat bunga (*discount rate*) tertentu. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikkan tingkat bunga pinjaman yang dikenakan kepada bank umum. Sebagai akibatnya, bank umum akan mengurangi pinjaman uangnya kepada bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit.
- b. Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh dalam mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut.

- 1) Menurunkan pengeluaran pemerintah. Pengurangan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan berkurangnya permintaan barang dan jasa. Pada saat permintaan tersebut berkurang, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang yang pada akhirnya mampu menekan tingkat inflasi.
- 2) Menaikkan pajak. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan (*disposable income*). Turunnya pendapatan masyarakat ini akan mendorong masyarakat untuk mengurangi permintaan konsumsinya. Pada akhirnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan inflasi dapat diturunkan.²²

D. Hakikat Jumlah Uang Beredar

Dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian perlu dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas atau sama dengan disebut uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis mata uang yang berada dalam perekonomian, yaitu ialah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.

Pengertian uang beredar atau *money supply* dibagi menjadi dua yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang

²² Wahyu Adji, et. all., *Ekonomi untuk SMA/MA Jilid 1 Kelas X...*, hal. 198-201

terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan pemerintah. Pengertian yang sempit atau terbatas dari uang beredar selalu disingkat dengan (M1). Dalam pengertian yang luas uang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian (M2)²³

Menurut para ahli ekonomi likuiditas perekonomian (M2) , ini lebih mencerminkan daya beli masyarakat. Dalam pengertian M1 hanya termasuk uang yang ada di tangan warga masyarakat dan dunia usaha, yang sebagian besar digunakan untuk transaksi-transaksi ekonomi sehari-hari. Tetapi belum mencerminkan jumlah uang yang dalam waktu singkat dapat dikerahkan untuk membeli barang dan jasa (atau untuk berspekulasi dengan valuta asing.

Orang perorangan maupun perusahaan yang mempunyai tabungan atau deposito berjangka di bank merasa bahwa uang itu miliknya, meskipun uang itu tidak segera dapat dibelanjakan. Hal ini jelas akan mempengaruhi perilakunya. Bila keadaan ekonomi tidak stabil atau terjadi perubahan tingkat bunga, maka jumlah uang beredar (M1) dapat berubah dalam waktu singkat, misalnya dengan mengalihkan dana dari deposito ke giro atau sebaliknya. Hal ini sangat mempersulit Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang dan kestabilan harga.

²³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 281

Pada dasarnya ada empat instansi yang menyelenggarakan atau ikut mempengaruhi jumlah uang beredar atau *money supply*, yaitu:

1. Bank Sentral

Mempunyai monopoli untuk mengedarkan uang kartal (logam dan kertas) dan mengawasi kegiatan perbankan.

2. Perbankan

Menampung tabungan masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan, menyelenggarakan uang giral dan bisa menciptakan kredit.

3. Pemerintah

Melalui keuangan negara dan perpajakan (APBN, PGPS, proyek-proyek pembangunan, subsidi-subsidi), penerimaan dari migas dalam bentuk valuta asing, dan sebagainya.

4. Luar Negeri

Terutama berhubungan dengan ekspor-impor, kredit dan bantuan LN, serta PMA²⁴

E. Hakikat Kurs Valuta Asing

1. Pengertian Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya uang rupiah yang

²⁴ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, ... hlm. 257-259

dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs yang menunjukkan bahwa US\$1.00 sama dengan Rp 8.400 berarti untuk memperoleh satu dolar Amerika Serikat dibutuhkan 8.400 rupiah Indonesia.²⁵

2. Penentuan Kurs Valuta Asing

Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi rendahnya kurs valuta asing.

a. Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate*)

Kurs tetap adalah kurs yang tidak berubah-ubah karena dikaitkan dengan emas sebagai standart atau patokannya. Pada zaman dulu semua pembayaran antar negara dilakukan dengan emas. Pada waktu itu semua negara terkemuka di dunia barat memakai standar emas. Berarti setiap negara mempunyai mata uang standar yang mengandung sejumlah emas dengan kadar yang ditetapkan dengan undang-undang.

Semua negara dan bank sentral sewaktu-waktu bersedia menukarkan mata uangnya dengan emas, dan menjual emas dengan harga yang telah ditetapkan secara resmi itu. Dengan cara demikian, kurs valuta sing atau perbandingan nilai antara mata uang dari berbagai negara juga tertentu dan pasti. Perbandingan itu disebut paritas emas.

²⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, ... hlm. 397

Dengan sistem standar emas ini kurs-kurs atau perbandingan nilai antara semua valuta nasional menjadi tetap dan tertentu. Hal ini ternyata sangat memperlancar perdagangan antar negara. Akan tetapi, tingkat harga dalam negeri menjadi tidak stabil. Sebab dalam sistem standar emas jumlah uang yang beredar langsung dikaitkan dengan persediaan emas. Bila ada arus keluar-masuk emas yang berkaitan dengan ekspor-impor, maka hal itu secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam negeri.

b. Kurs Bebas (*Floating Exchange Rate*)

Kurs bebas adalah kurs yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar bebas, lepas dari kaitan dengan emas, dan juga lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini kurs bisa naik-turun dengan bebas, atau disebut kurs mengambang (*floating rates*).

Ketika tahun 1930-an emas dilepaskan sebagai standar keuangan nasional dan internasional, kurs valuta asing juga kehilangan patokannya. Kurs-kurs dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran di bursa-bursa internasional. Dengan demikian, jumlah uang beredar dan tingkat harga dalam negeri lebih dapat dikendalikan. Tetapi akibatnya kurs menjadi yang tidak stabil, sewaktu-waktu bisa naik-turun atau berubah-ubah.

Di lain pihak kegocangan kurs dirasa merugikan perdangan internasional. Terutama ketidakpastian tentang tinggi-rendahnya

kurs di masa mendatang amat mempersulit perhitungan harga/biaya sera pembayaran internasional. Juga mudah timbul spekulasi dalam mata uang asing, yang justru lebih mempehebat kegoncangan kurs dan betul-betul merugikan perdagangan dan industri.

c. Kurs Distabilkan (*Managed Floating*)

Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional, yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau valuta lainnya. karena keberatan-keberatan terhadap kurs yang tak menentu itu, maka pada akhir perang dunia ke-2 negara-negara maju bertekad untuk menstabilkan kembali kurs-kurs mereka.²⁶

Sementara itu Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi Modern menyatakan bahwa penentuan kurs valuta asing dapat dibedakan kepada dua sistem yaitu kurs tetap dan kurs fleksibel.

a. Sistem Kurs Tetap

Yang dimaksud dengan kurs tetap adalah sistem penentuan mata uang asing di mana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak berubah dalam jangka masa yang lama. Dalam sistem ini semua transaksi mata uang akan menggunakan kurs yang ditetapkan bank sentral. Dalam melakukan jual beli mata uang asing lembaga-lembaga keuangan,

²⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, ... hlm. 300-3002

terutama bank perdagangan, akan menggunakan kurs yang ditetapkan ini.

Sebagai contoh misalkan bank sentral menetapkan kurs yang berikut antara dolar US dengan rupiah: $US\$1,00 = Rp\ 10.000$. Berdasarkan kurs ini, jual beli dolar akan menggunakan kurs tersebut. Sistem kurs tetap tidak dapat menjamin agar keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing dicapai pada kurs yang ditetapkan. Pada umumnya keseimbangan di pasaran bebas akan dicapai pada kurs yang berbeda. Dengan demikian pada kurs yang ditetapkan biasanya permintaan dan penawaran tidak seimbang.

b. Sistem Kurs Fleksibel (Berubah Bebas)

Dalam sistem kurs valuta asing yang fleksibel, harga valuta asing ditetapkan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran. Dari hari ke hari permintaan dan penawaran valuta asing mengalami perubahan. Maka kurs valuta asing akan selalu mengalami perubahan. Dalam sistem penentuan kurs pertukaran ini bank sentral tidak perlu secara aktif menyertai jual beli valuta asing di pasaran.

Fleksibilitas harga valuta asing akan menjamin tercapainya keadaan di mana permintaan valuta asing adalah sama dengan penawaran valuta asing. Dengan demikian bank sentral tidak perlu menyimpan cadangan valuta asing yang berlebih-lebihan untuk digunakan dalam intervensi pasaran apabila ketidakseimbangan di

antara permintaan dan penawaran valuta asing berlaku. Ini merupakan kebaikan utama dari sistem kurs fleksibel.²⁷

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs antara lain:

a. Perubahan Dalam Citarasa Masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.

b. Perubahan Harga Barang Ekspor Dan Impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah sesuatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka eksportnya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-

²⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 197-198.

harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang tersebut.

c. Kenaikan Harga Umum (Inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi yang pertama inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor. Keadaan ini menyebabkan permintaan atas valuta asing bertambah.

Efek yang kedua inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan ini menyebabkan penawaran atas valuta asing berkurang maka harga valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

d. Perubahan Suku Bunga Dan Tingkat Pengembalian Investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengebalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri.

Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu.

Apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu naik. Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot.²⁸

4. Kebijakan Nilai Tukar (Kurs Valuta Asing)

Dalam sejarah prekonomian Indonesia, sistem nilai tukar tetap, sistem mengambang terkendali, dan sistem mengambang penuh

²⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, ... hlm. 402-403

diterapkan di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga Maret 1983. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat ditetapkan pada periode Maret 1983 – September 1986. Dalam periode ini, pemerintah pernah melakukan beberapa kebijakan devaluasi atas nilai tukar rupiah sebagai berikut

- a. Devaluasi November 1987 dari Rp 425 per USD menjadi Rp 625 per USD;
- b. Devaluasi Maret 1983 dari Rp 625 per USD menjadi Rp 825 per USD; dan
- c. Devaluasi September 1986 dari 1134 per USD menjadi Rp 1644 per USD.

Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pernah diterapkan di Indonesia dari September 1986 – Januari 1994 dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 – Agustus 1997. Dalam periode ini dilakukan kebijakan nilai tukar sebagai berikut.

- a. Bank Indonesia setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian;
- b. Pita intervensi pernah dilakukan pelebaran sebanyak 8 kali, yaitu dari Rp 6 (0,25%) menjadi Rp 10 (0,05%) pada September 1992, menjadi Rp 20 (1%) pada Januari 1994, menjadi Rp 30 (1,5%) pada September 1994, menjadi Rp 44 (2%) pada Mei 1995, menjadi Rp 66 (3%) pada Desember 1995, menjadi Rp 118 (5%) pada Juni 1996, menjadi Rp

192 (8%) pada September 1996, dan menjadi Rp 304 (12%) pada Juli 1997.

- c. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar rupiah bergerak dalam batas-batas pita intervensi yang ditetapkan, dengan cara membeli valuta asing apabila nilai-nilai tukar mendekati batas atas dalam pita intervensi yang telah diterapkan.

Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang ditetapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini ditempuh sebagai reaksi pemerintah dalam menghadapi demikian besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar rupiah pada sekitar Juli – Agustus 1997. Serangan spekulasi terhadap rupiah yang dipicu oleh dampak menjalar serangan spekulasi terhadap mata uang baht Thailand telah menyebabkan gejolak dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang selanjutnya mendorong investor luar negeri menarik dananya secara esar-besaran dan pada waktu yang bersamaan di Indonesia. Kepanikan kemudian terjadi di pasar valuta asing karena perusahaan dan bank-bank di dalam negeri memborong valuta asing untuk membayar atau melindungi kewajiban luar negerinya dari risiko nilai tukar, sementara sebagian para pelaku pasar berspekulasi untuk mencari keuntungan pribadi.

Pada awalnya pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah, antara lain dengan intervensi di pasar

valuta asing dan beberapa kali memperlebar kisaran pita intervensi nilai tukar rupiah sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dianut waktu itu. Akan tetapi, tekanan yang sangat besardan demikian cepat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan cadangan devisa yang terus berlangsung memaksa pemerintah mengubah sistem nilai tukar rupiah menjadi sistem mengambang. Apabila sistem mengambang terkendali tetap dipertahankan, maka cadangan devisa negara yang mulai menipis dikhawatirkan dapat terkuras habis dan menimbulkan krisis neraca pembayaran yang berat. Sejumlah negara tetangga, seperti Korea Selatan dan Thailand, juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Sesuai dengan undangundang tersebut, sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Bank Indonesia. Hal ini mengingat perubahan sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan di bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga terhadap kegiatan ekonomi riil baik konsumsi, investasi maupun perdagangan luar negeri. Karena itu, perubahan sistem ilai tukar harus melalui pemikiran dan penelitian yang matang, mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, politik, mapun sosial.

Dalam hal ini, Bank Indonesia perlu memberikan rekomendasi mengenai rencana perubahan sistem nilai tukar tersebut, apabila akan dilakukan, terutama karena pengalaman dan pengetahuannya di bidang ini maupun karena pengaruhnya terhadap kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa:

- a. Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap.
- b. Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang
- c. Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali.

Dengan dianutnya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, pergerakan nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan valuta asing di pasar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia berupa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar. Intervensi

dimaksud tidak dimaksudkan untuk mencapai atau mengarahkan peregrakan nilai tukar rupiah pada tingkat atau kisaran tertentu.²⁹

F. Hakikat Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.³⁰ Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.³¹

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas

²⁹ Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 159-162.

³⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah...*, hal. 149

³¹ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 137

dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang.³²

Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.³³ Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut.³⁴

2. Indikator Profitabilitas

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi.³⁵ Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik

³² Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 110

³³ Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 146

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hal. 865

³⁵ Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 39

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor.

Mengenai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya, yaitu:

Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.

Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Mengenai profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae

K. Shim mengatakan:

(1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan.

Adapun rumus rasio *net profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

c. *Return on Equity* (ROE)

Rasio *return on equity* disebut juga dengan laba atas *equity*.

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus ROE adalah:³⁶

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

d. *Return on Assets* (ROA)

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:³⁷

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

³⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 135-137

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 159

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas PT. BRI Syariah. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sehingga indikator ini sesuai dengan industri perbankan. Menurut Meythi dalam Stiawan³⁸ menyatakan bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

G. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan

³⁸ Adi Stiawan, “Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar, dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah” dalam http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI_STIAWAN.pdf, diakses 13 Januari 2015.

yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁹

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴⁰

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

³⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hal. 13

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (*fee*).⁴¹

Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada kelima prinsip syariah di atas, secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Produk Pendanaan

Meliputi: pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).

b. Produk Pembiayaan

Meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

⁴¹ *Ibid.*, hal. 86

c. Produk Jasa Perbankan

Meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadiah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*)), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).⁴²

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif.

a. Hukum Normatif

Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan “individu” dalam menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal (pribadi orang per-orang) atau institusional (lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan, berarti yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank.

Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan *brand* “syariah”. Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap bank yang menggunakan syariah, maka prinsip

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 112-129

operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah (Islam). Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah adalah:

- 1) Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh.
- 2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.

b. Hukum Positif

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikatego-rikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

3) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁴³

3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank Islam sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, dalam operasionalnya bank Islam melarang adanya riba karena aktivitas yang mengandung riba tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank Islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset.

Beberapa contoh dari perbedaan antara sistem Bank Islam dan Bank Konvensional.⁴⁴

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bank Islam dan Sistem Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan	Fungsi dan operasi didasar-

⁴³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 85-94

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, hal. 38-40

	pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	kan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiaya-an	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk <i>profit margin</i> dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpan-an	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan <i>Investment banks</i> . Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
<i>Restrictions</i> (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan memba-	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari

	yar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan biaya <i>penalty</i> dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi <i>derivative</i> dilarang karena mengandung unsur spekulasi.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis <i>derivative</i> atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
<i>Customer Relations</i>	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai <i>partner/investor</i> dan <i>entrepreneur/pengusaha</i> .	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor.
Syariah <i>Supervisory Board</i>	Setiap bank harus memiliki Syariah <i>Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.

(Sumber: Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik)

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh produk domestik bruto, inflasi, ekspor dan impor terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan proposal ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Sahara dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan produk domestik bruto terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah di Indonesia periode 2008-2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dimana penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap ROA perbankan syariah dan secara simultan inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial PDB berpengaruh positif terhadap ROA dan secara simultan PDB berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁴⁵

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sahara dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu inflasi dan produk domestik bruto serta variabel dependennya yaitu ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Sahara dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel nilai tukar rupiah sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2008-2010, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011-2011.

Kedua, studi yang dilakukan Hidayati, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan kurs terhadap profitabilitas

⁴⁵ Ayu Yanita Sahara, "Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen* /Volume 1 Nomor 1 Januari 2013

(ROA) bank syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Menghasilkan kesimpulan bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Bagi bank terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangannya. Sedangkan variabel kurs (nilai tukar rupiah) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.⁴⁶

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu inflasi serta variabel dependennya yaitu ROA. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel PDB sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 35 unit dengan periode penelitian dari tahun 2009-2012, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011-2018.

Ketiga, dalam jurnal penelitian Sodik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, produk domestik bruto dan jumlah uang beredar terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menghasilkan kesimpulan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap

⁴⁶ Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia", *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No.01, Oktober 2014

ROA Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan secara simultan variabel inflasi, produk domestik bruto dan umlah uang beredar berpengaruh secara signifikan terhadap ROA⁴⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen inflasi dan produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang variabel independen yang digunakan ditambah dengan kurs valuta asing.

Keempat, studi yang dilakukan Cahyani, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan PDB terhadap *Return On Assets* (ROA) dengan menggunakan teknik analisis menggunakan regresi berganda menghasilkan kesimpulan bahwa variabel inflasi dan PDB secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Sedangkan secara simultan variabel inflasi dan PDB tidak memiliki pengaruh terhadap ROA⁴⁸

Persamaan ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel independen inflasi dan PDB. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang variabel independennya ditambah dengan jumlah uang beredar dan kurs valuta asing.

Kelima, kajian yang dilakukan Swandayani dan Kusumaningtias, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar valas

⁴⁷ Amirus Sodiq, "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap *Return On Asset* Bank Syariah", *Jurnal EQUILIBRIUM* Volume 2, No.2, Desember 2014

⁴⁸ Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (*BI Rate*), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076, Vol. 5 No. 1 Juni 2018

terhadap profitabilitas pada bank syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple linier regression*) menghasilkan kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel inflasi, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Hasil secara parsial nilai tukar valas dan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel inflasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA perbankan syariah.⁴⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandayani dan Kusumaningtias, yaitu pada variabel independen nilai tukar rupiah serta variabel dependennya yaitu ROA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Swandayani dan Kusumaningtias terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel PDB sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2005-2009, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah periode 2011-2018.

⁴⁹ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009", *Jurnal Akuntansi AKRUAL* 3 (2) (2012): 147-166 e-ISSN: 2502-6380

Keenam, Asrina, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto dan nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan *Eviews 3.0*. Menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia dan secara simultan variabel PDB berpengaruh terhadap ROA bank syariah. Sedangkan nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia.⁵⁰

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asrina dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu nilai tukar rupiah dan PDB, serta variabel dependennya yaitu ROA. Sedangkan perbedaan penelitian Asrina dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel inflasi dan jumlah uang beredar sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu keseluruhan bank syariah yang ada yaitu 34 bank meliputi 11 Bank Umum Syariah (BUS), dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode 2008-2013, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah periode 2011-2018.

Ketujuh, penelitian Dwijyanthy dan Naomi, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap profitabilitas (ROE)

⁵⁰ Putri Asrina, "Analisis Pengaruh PDB, Nilai Tukar Rupiah, *Non Performing Finance* (NPF), BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2008-2013", *Faculty of Economics Riau University, Jom FEKON Vol. 2 No. 1. Februari 2015*

Bank periode 2003-2007. Regresi berganda dengan metode mundur digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Naiknya tingkat inflasi akan mengakibatkan suku bunga naik, sehingga masyarakat enggan meminjam pada bank.⁵¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dwijyanthy dan Naomi dengan penelitian ini adalah variabel independen yaitu inflasi dan nilai tukar. Sedangkan perbedaan penelitian Dwijyanthy dan Naomi dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel PDB dan Jumlah Uang Beredar sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu bankbank konvensional yang tercatat pada LQ-45 di BEI periode Februari-Juli 2008, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah periode 2011-2018.

Kedelapan, dari studi yang dilakukan Ridhwan, dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap profitabilitas pada bank syariah menghasilkan kesimpulan bahwa secara simultan dan parsial variable inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.⁵²

⁵¹ Febrina Dwijyanthy dan Prima Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007", *Jurnal Mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta, KARISMA Vol. 3 (2): 87-98, 2009*

⁵² Ridwan, "Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 18 (2) JuliDesember 2016*

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridhwan, yaitu pada variabel independen inflasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ridhwan terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel nilai tukar, jumlah uang beredar dan PDB sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya Bank Syariah Mandiri periode penelitiannya tahun 2005-2013, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah periode 2011-2018.

Kesembilan, dari kajian yang telah dilakukan Idrus dalam jurnalnya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan menggunakan metode analisis menggunakan regresi linier berganda menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).⁵³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Idrus ialah pada variabel independen yaitu nilai tukar rupiah (kurs). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Idrus terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel PDB sebagai salah satu variabel yang juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu tujuh bank syariah di Indonesia periode 2010 hingga 2014, sedangkan dalam penelitian ini yang

⁵³ Ali Idrus, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap *Return On Equity* (ROE)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 29 No.2 2018, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011- 2018.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Adiyadnya, et. al., yang mengarah pada pengaruh PDB terhadap profitabilitas bank. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) yang menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Peningkatan PDB dalam suatu negara menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi profitabilitas perbankan.⁵⁴

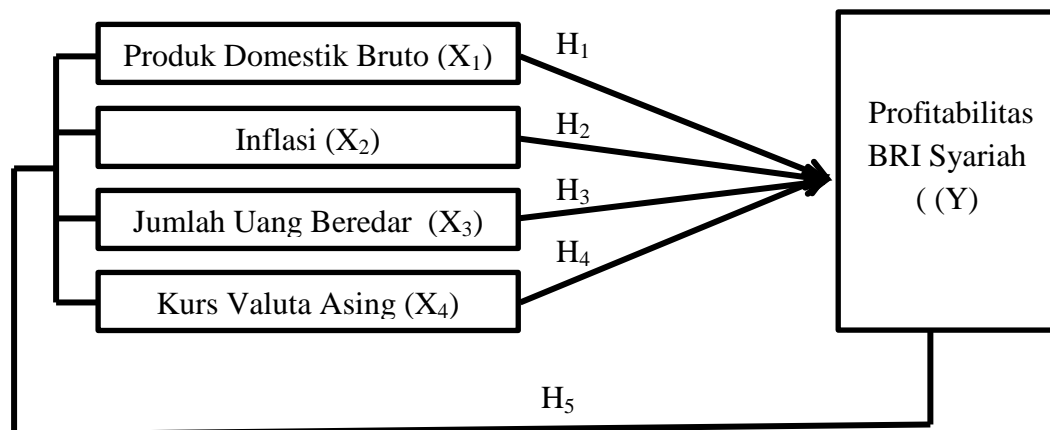
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu pada variabel independen yaitu PDB. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan indikator ROA sebagai pengukur profitabilitas. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2008-2013, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011-2018.

I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variable dependen (Profitabilitas/ Return On Assets) dengan variable independen (Produk domestik bruto, inflasi, jumlah uang beredar dan

⁵⁴ I Nyoman Sidhi Adiyadnya, et. al., "Pengaruh Beberapa Variabel Ekonomi Makro Terhadap Profitabilitas Dan Return Saham Pada Industri Perbankan Di BEI", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.8 (2016)

kurs valuta asing) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan:

1. Pengaruh PDB terhadap profitabilitas (ROA) didukung teori yang dikemukakan oleh Sukirno⁵⁵ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sodik⁵⁶, Sahara⁵⁷, Asrina⁵⁸, dan Cahyani⁵⁹.
2. Pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas (ROA) didukung teori yang dikemukakan oleh Gilarso⁶⁰ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Dwijyanthy dan Naomi⁶¹, Ridhwan⁶², dan Idrus⁶³
3. Pengaruh Jumlah uang beredar terhadap profitabilitas (ROA) didukung penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Sodik⁶⁴ dan Swandayani dan Kusumaningtias⁶⁵

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar edisi Ketiga*, ...hal.82

⁵⁶ Amirus Sodik, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

⁵⁷ Ayu Yanita Sahara, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

⁵⁸ Putri Asrina, "Analisis Pengaruh PDB..."

⁵⁹ Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, ..."

⁶⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, ... hal.206

⁶¹ Febrina Dwijyanthy dan Prima Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

⁶² Ridwan, "Pengaruh Suku Bunga ..."

⁶³ Ali Idrus, "Pengaruh Faktor..."

⁶⁴ Amirus Sodik, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

4. Pengaruh Kurs Valuta Asing terhadap profitabilitas (ROA) didukung teori yang dikemukakan oleh Loen dan Ericson⁶⁶ serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hidayati⁶⁷, Swandayani dan Kusumaningtias⁶⁸, dan Asrina⁶⁹
5. Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, jumlah uang beredar dan kurs valuta asing terhadap profitabilitas (ROA) berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Sahara⁷⁰, Sodik⁷¹, Cahyani⁷², serta Swandayani dan Kusumaningtias⁷³

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa diartikan sebagai proposisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁷⁴ Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁷⁵ Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRI Syariah.
2. H2: Inflasi berpengaruh terhadap signifikan profitabilitas PT PT BRI Syariah.

⁶⁵ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi..."

⁶⁶ Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa, ...* hal.19

⁶⁷ Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi..."

⁶⁸ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi..."

⁶⁹ Putri Asrina, "Analisis Pengaruh PDB..."

⁷⁰ Ayu Yanita Sahara, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

⁷¹ Amirus Sodik, "Analisis Pengaruh Inflasi..."

⁷² Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, ..."

⁷³ Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Inflasi..."

⁷⁴ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 46

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 64

3. H3: Jumlah uang beredar berpengaruh terhadap signifikan profitabilitas PT BRI Syariah.
4. H4: Kurs valuta asing berpengaruh terhadap signifikan profitabilitas PT BRI Syariah.
5. H5: Produk domestik bruto, Inflasi, jumlah uang beredar dan kurs valuta asing secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT BRI Syariah.